

INTISARI

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh :

Anindya Dwi Haprita¹, Dinarjati Eka Puspitasari²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, menjelaskan dan mengetahui pengelolaan limbah medis serta efektifitasnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang didapatkan dari literatur, studi kepustakaan, mengkaji norma norma aturan hukum yang ada dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kepala Puskesmas Pondok Kacang Timur . Setelah mendapat informasi atau data yang diperlukan, akan dianalisis mengenai masalah yang bersangkutan.

Penelitian hukum ini memberikan jawaban pengaturan limbah medis dan bagaimana keefektifitasannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Cipta Kerja (UUCK). Perlu diketahui sebelumnya bahwa UUCK mengadopsi konsep *Omnibuslaw* yang merupakan gabungan dari beberapa peraturan yang sudah ada sehingga adanya simplifikasi peraturan perundang-undangan dan perizinan terkait pengelolaan limbah medis. Tujuan dari simplifikasi tersebut adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk kepentingan pertumbuhan investasi dengan cara memberi kemudahan dan kemurahan bagi calon investor atau pelaku usaha. Namun adanya perubahan kewenangan dalam hal pengawasan dan pemberian izin yang dialihkan ke Pemerintah pusat tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga hasil dari penelitian tersebut bahwa UUCK pada pelaksanaannya belum efektif, maka dari itu perlu adanya pengkajian kembali.

***Kata Kunci: Pengelolaan Limbah B3, Undang-Undang Cipta Kerja,
Perizinan dan pengawasan***

¹ 1Mahasiswa Strata Satu (S-2) pada Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta (anindyahaprta@gmail.com).

² Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

JURIDICAL REVIEW OF THE MEDICAL WASTE POST THE PROVISION OF LAW NUMBER 6 OF 2023 ABOUT JOB CREATION

By :

Anindya Dwi Haprita³, Dinarjati Eka Puspitasari⁴

ABSTRACT

This research aims to analyze , explain and know management B3 waste or waste medical as well as its effectiveness post its publication Constitution Number 6 of 2023 concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 concerning Job Creation become Constitution

The method of research is descriptive- normative meaning in Analyzing problems is carried out by combining primary data obtained from literature, library research, reviewing existing legal norms and secondary data obtained from interviews with sources. from interview with source person such as the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and Head Public health center Cottage Peanut East . After getting the information or required data , will analyzed about the problem concerned .

This legal research provides answers to medical waste regulation and how effective it is after the issuance of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (UUCK). It should be noted in advance that the UUCK adopts the concept of *Omnibuslaw* which is a combination of several existing regulations so that there is a simplification of laws and regulations and licensing related to medical waste management. The purpose of the simplification is to provide justice, usefulness and legal certainty for the benefit of investment growth by providing convenience and generosity for potential investors or business actors. However, the change in authority in terms of supervision and licensing transferred to the central government is not supported by adequate human resources so that the results of the study show that the UUCK in its implementation has not been effective, therefore it is necessary to re-assess.

Keywords: Management B3 Waste , Job Creation Law , Licensing and supervisi

³1 Undergraduate Student (Master's Degree) in Litigation Law , Faculty of Law, Gadjah Mada University , Jakarta (anindyahaprita@ gmail .. com).

⁴Lecturer at the Department of Environmental Law , Faculty of Law, Gadjah Mada University , Yogyakarta.

